

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN  
PT. PAM TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO**

**Miranti<sup>1</sup>**

**Junaidi, S.E, M.Ak, Ak, CA, Ph.D<sup>2</sup>**

**I Ketut Patra, S.E.,M.Si<sup>3</sup>**

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palopo Jalan Jendral Sudirman Km.03  
Binturu Wara Selatan Kota Palopo Sulawesi Selatan 91992  
Email: mirantirande@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the effect of performance-based budgeting on the financial accountability of PT. PAM TM Palopo City. The data used in this research is primary data, the data collection method uses a questionnaire to 70 employees at PT. PAM TM Palopo City. The analysis in this study uses simple regression analysis, after the data is collected, then it is processed using the SPSS (Statistics product and survey salution) application version 23. The results of this study are the t-test, performance-based budgeting (X) has a significant effect on financial accountability with a value of  $T_{count} = 2,381 > T_{table} 1,667$  with a significant value of  $0.020 < 0.05$ . The simple regression coefficient value shows that the performance-based budget is 33.3% while the remaining 66.7% is influenced by other factors not examined in this study.*

*Keywords: Performance-Based Budgeting, Financial Accountability*

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan PT. PAM TM Kota Palopo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, metode pengambilan data menggunakan kuesioner kepada 70 pegawai di PT. PAM TM Kota Palopo. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, setelah data terkumpulkan, kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS (*Statistic product and survey solution*) versi 23. Hasil penelitian ini pertama uji t, anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai  $T_{hitung} = 2,381 > T_{tabel} 1.667$  dengan nilai signifikan  $0,020 < 0,05$ . Nilai koefisien regresi sederhana menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja 33,3% sedangkan sisanya 66,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Keuangan

## **PENDAHULUAN**

Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu untuk menunjang kebutuhan kelangsungan hidupnya ialah air. Air dapat diperoleh langsung dari alam atau melalui sumber yang dikelola oleh pihak lain seperti air minum dalam kemasan atau dari PDAM. Karena sifat air merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendasar oleh manusia, sehingga ketersediannya harus selalu terjaga dengan baik.

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, yang menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga pengelolaan air bersih tersebut tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta. Di negara kita pengelolaan air diberikan kepercayaan oleh pemerintah kepada PDAM. Kehadiran PDAM didukung oleh undang-undang No. 5 tahun 1962 yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang air minum bersih, dimana aktifitas PDAM mulai dari mengumpulkan, mengolah dan menjernihkan sampai pada pendistribusian air ke pelanggan atau konsumen.

PDAM merupakan badan usaha yang menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai perusahaan berorientasi sosial dan perusahaan berorientasi laba. Orientasi sosial adalah pelayanan kepada pelanggan didalam penyediaan air bersih sedangkan orientasi laba adalah tujuan untuk menghasilkan laba sebagai dana operasional dan sebagai sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka merealisasikan kontribusi kepada pemerintah

daerah dalam bentuk setoran PAD, manajemen PDAM harus memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, infrastruktur produksi dan distribusi, penanganan pelanggan dan pemanfaatan perkembangan teknologi pengelolaan air, dalam rangka mewujudkan efisiensi.

Dalam operasionalnya, PDAM memiliki beberapa hal yang akan menjadi kendala dalam proses pencapaian akuntabilitas keuangan PT. PDAM. Adapun kendala tersebut antara lain terangkum dalam aspek Keuangan. Hal tersebut dikarenakan tingkat cakupan pelayanan yang masih rendah, kinerja yang masih rendah, menurunnya potensi sumber daya air baku pada saat kemarau, dan masih tingginya tunggakan pembayaran pelanggan.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, perlu disusun tujuan, sasaran serta indikator keberhasilan yang dirampungkan dalam bentuk rencana strategik. Indikator keberhasilan merupakan alat ukur yang harus dievaluasi secara periodik serta berkesinambungan. Dan selanjutnya dijadikan bahan untuk mengendalikan arah dan mutu pelayanan agar tujuan serta indikator yang telah ditetapkan benar-benar dapat diwujudkan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penganggaran berbasis kinerja di atur

dalam permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah. Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan pemerintah tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Anggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan anggaran berbasis kinerja dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Sitoyo et al. 2015). Sedangkan Menurut Bahri, (2012) Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran berorientasi pada output.

Akuntabilitasi merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil

pada pelayanan publik. Sedangkan menurut Choirul, (2012) akuntabilitasi ialah suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga perlu disadari bahwa semua kegiatan organisasi publik dalam memberikan pelayanan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian karyawan pada PT. PAM Kota Palopo merupakan unsur dari organisasi yang sangat penting. hal ini dikarenakan karyawan sebagai penggerak dan pelaksana setiap perusahaan atau instansi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, bagaimanapun baiknya perusahaan tidak akan berjalan dengan baik jika karyawan sebagai pelaksanaannya tidak bekerja dengan baik. lingkungan kerja dan disiplin kerja dapat terealisasikan dengan adanya tujuan dari perusahaan sesuai dengan perkembangan zaman dan haruslah di tunjang dengan penganggaran kinerja, karena karyawan sebagai suatu sumber daya yang berkualitas yang akan menjadi pelaksana kegiatan pembangunan pada PT. PAM Kota Palopo, maka diperlukannya suatu anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas yang memadai dengan mengikuti pengembangan sumber daya manusia yang dimana merupakan unsur paling penting dalam pengembangan suatu perusahaan.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu terletak pada permasalahannya dimana penelitian yang dilakukan Rasma (2015) menjelaskan bahwa permasalahan yang sering dihadapi

oleh organisasi sektor publik adalah terjadinya kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan. Sedangkan penelitian Sari (2017) menjelaskan bahwa melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini, penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (*value for money*) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (*money follow function*) sesuai dengan kebutuhan riil setiap unit kerja.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengembangan sumber daya manusia terhadap akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dikaji, dalam tujuannya mencapai visi dan misi perusahaan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut saya mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.”**

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Anggaran Berbasis Kinerja**

#### **1. Pengertian Anggaran berbasis kinerja**

Anggaran merupakan salah satu masalah yang sangat penting pada organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penerapan dengan berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja instansi pemerintah harus menaati unsur-unsur anggaran kinerja agar dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Menurut Mahmudi, (2016:69) Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut (Halim and Kusufi 2016:48) Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dan menurut Djayasinga, (2015:35) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

#### **2. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut

Djayasinga, (2015:56)

mengemukakan manfaat anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi umpan balik bagi sebuah organisasi untuk mengambil langkah untuk tahun-tahun berikutnya.

2. Organisasi/institusi akan mempunyai rencana kerja yang pasti dan menjadi acuan bagi karyawannya untuk mencapai tujuan itu.
3. Pegawai akan lebih termotivasi bekerja sebab tolak ukur penilaian kinerjanya melalui sistem ini.
4. Bahan untuk promosi atau penundaan jabatan, penghargaan, hukuman atau lainnya jelas dasarnya.
5. Pegawai/karyawan/PNS akan lebih efektif bekerja karena tahu dan jelas apa yang akan dan harus dikerjakannya untuk satu periode ke depan.
6. Dapat menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik.
7. Dapat membantu masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan yang sudah diberikan/disediakan.
8. Merupakan sebuah alat komunikasi yang efektif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.

### 3. Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Halim and Iqbal, (2012:178) dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Masyarakat juga

berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.
3. Keadilan anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.
4. Efisiensi dan efektivitas anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal

- untuk kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

#### 4. Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Halim and Kusufi, (2016:57) dijelaskan bahwa keunggulan dan kekurangan dari anggaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan dari penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah:
  - a. Adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja.
  - b. Pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja.
  - c. Menghindari pemborosan.
2. Kelemahan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
  - a. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan

- memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
- b. Banyak jasa dan aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah.
- c. Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (*cash basis*).
- d. Kadang kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lainnya tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah aktivitas tersebut perlu atau tidak.

#### Akuntabilitas Keuangan

##### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab.

Menurut Choirul, (2012) akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah terhadap publik yang menjadi konsumen pelayanannya. Hal ini terkait dengan pemikiran/konsep masyarakat yang demokratis. Sedangkan menurut Mardiasmo,

(2012:20) akuntabilitas ialah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Mahmudi, (2010:28), yang mengutip dari Hopwood, tomskin (1984: Elwood (1993) Aspek atau dimensi akuntabilitas publik dalam organisasi sektor publik menjelaskan bahwa terdapat 5 aspek adalah :

#### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Pengguna dana publik harus dilakukan secara benar dan mendapatkan otorisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi.

#### 2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban publik dalam melakukan pengelolaan organisasi secara sektor publik secara efisien dan efektif, akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Efisiensi organisasi publik menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kliennya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses

bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya dan apakah telah mempertimbangkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi yang hendaknya merupakan program bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Dalam membuat kebijakan lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu yang diambil, siapa sasaran dari kebijakan tersebut, *stakeholder* mana yang akan berpengaruh dan memperoleh dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pengukuran akuntabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang diambil atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang diambil atau diabaikan.

#### 5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif tidak ada pemborosan serta korupsi. Akuntabilitas finansial

mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

## 2. Sifat Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial

2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrative
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ketahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability* Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).
2. *Process accountability* Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
3. *Performance accountability* Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
4. *Program accountability* Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
5. *Policy accountability* Dalam tahap ini dilakukan pemilihan

berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan menciptakan system pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

### 3. Macam - Macam Akuntabilitas

Dalam Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) Pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban

unit – unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban pada masyarakat luas.

### 4. Indikator Akuntabilitas

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi, (2011:19) dimensi tersebut dapat di turunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

#### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.

- a. Kepatuhan terhadap hukum.
- b. Penghindaran korupsi dan kolusi.

#### 2. Akuntabilitas Proses.

- a. Adanya Kepatuhan terhadap Prosedur.
- b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
- c. Adanya pelayanan publik yang cermat
- d. Adanya pelayanan publik dengan biaya murah.

#### 3. Akuntabilitas program

- a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
- b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
- b. Mempertimbangkan dampak di masa depan.

## **HIPOTESIS**

Menurut Sugiyono, (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum ada jawaban empiris. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan

Anggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Akuntabilitas Keuangan merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  : Terdapat pengaruh signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan menggunakan analisis data statistik, yakni menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang berlokasi di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Waktu penelitian dua bulan, yaitu mulai bulan April sampai Mei 2021.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Ismayanto, Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang didalamnya dapat memperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Sitoyo et al. (2015:64). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data karyawan perusahaan, sejak berdirinya PT. PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini yaitu data karyawan perusahaan pada PT. PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo tahun 2016-2020.

### Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari data laporan keuangan pada PT. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo tahun 2016-2020. Dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, Menurut Sugiyono, (2018:213) Data primer adalah data yang diperoleh dari angket dari angket yang dibagikan kepada responden. Kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilih jawaban yang telah tersedia, responden memilih jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data primer dalam penelitian ini dari angket atau

keusioner yang dibagikan kepada responden.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner yaitu metode dimana peneliti menyusun pertanyaan secara tertulis yang kemudian dibagikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan.

### Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Analisis Deskriptif**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X	70	30	50	42,56	3,888
Total_Y	70	30	50	41,63	4,669
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data diolah di SPSS 2021

## 2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur data pada suatu kuesioner valid atau tidak. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor setiap butir pernyataan responden dengan total skor variabel sehingga diperoleh nilai pearson correlation. Untuk mengetahui valid tidaknya butir

pernyataan dapat menggunakan rumus  $r$  hitung  $> r$  tabel maka dikatakan valid, Sebaliknya jika  $r$  hitung  $< r$  tabel maka dikatakan tidak valid. Penentuan  $r$  tabel yaitu  $df = N - k$  dengan taraf signifikansi 5%. Adapun data hasil uji validitas penelitian ini, disajikan pada tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Indikator Pernyataan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Anggaran Berbasis Kinerja (X)	X1	0,855	Valid
		X2	0,864	Valid
		X3	0,862	Valid
		X4	0,851	Valid
		X5	0,857	Valid
		X6	0,853	Valid
		X7	0,854	Valid
		X8	0,864	Valid
		X9	0,872	Valid
		X10	0,863	Valid
2	Akuntabilitas Keuangan (Y)	Y1	0,557	Valid
		Y2	0,630	Valid
		Y3	0,697	Valid
		Y4	0,644	Valid
		Y5	0,675	Valid
		Y6	0,706	Valid
		Y7	0,807	Valid
		Y8	0,649	Valid
		Y9	0,703	Valid
		Y10	0,763	Valid

Dari tabel diatas, instrumen keusioner yang terdiri dari beberapa butir pernyataan dinyatakan valid. Karena korelasi antara masing-

masing skor pernyataan lebih besar dari r tabel yakni 0,235 dan dibawah 0,05.

### 3. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran kembali terhadap gejala yang sama maka dalam penelitian ini dilakukan uji reabilitas. Suatu data atau instrument dikatakan reliabel apabila data yang digunakan tersebut beberapa kali diukur dengan objek

yang sama menghasilkan jawaban atau data yang sama pula. Dalam uji reliabilitas digunakan teknik cronbach's alpha. Pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,6 dan nilai *cronbach's alpha* dimaksud, dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,872	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan	0,913	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diatas, semua variabel yang menjadi instrument dalam penelitian dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat pada tingkat

reliabilitas yang tinggi dengan nilai cronbach's alpha > 0,6 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal atau reliabel.

#### 4. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen

dengan variabel independen. Adapun hasil uji regresi sederhana mengenai data penelitian ini, disajikan dalam tabel 4.8 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Regresi Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27,454	5,978		4,592	,000
Total_X	,333	,140	,277	2,381	,020

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Data diolah di SPSS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan regresi linear sederhana yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 27.545 + 0.333 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan

X = Anggaran Berbasis Kinerja

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = error

#### 5. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 5**  
**Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,277 <sup>a</sup>	,077	,063	4,519

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan tabel 4.9 koefisien korelasi sebesar 0,277 atau 27,7% artinya hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan masih sangat lemah. Sedangkan koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh *Adjusted R Square* sebesar 0,063 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen yang terdiri dari anggaran berbasis kinerja terhadap variabel dependen adalah sebesar 6,3% sedangkan sisanya sebesar 93,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih besar faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

## 6. Uji t

**Tabel 6**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27,454	5,978		4,592	,000
Total_X	,333	,140	,277	2,381	,020

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Data diolah di SPSS 2021

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial) adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian mempunyai probabilitas sebesar  $0,020 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 2,381 > t_{tabel} 1,667$ . Hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan dapat diterima. Artinya jika anggaran berbasis kinerja meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas juga mengalami peningkatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Dalam Penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Artinya jika anggaran berbasis kinerja ditingkatkan, maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat, sebaliknya jika anggaran berbasis kinerja menurun, maka akuntabilitas keuangan juga akan menurun. Hal ini menandakan bahwa anggaran berbasis kinerja yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik pula pada akuntabilitas keuangan.

Anggaran menjadi suatu hal yang relevan dan penting dalam lingkup pemerintahan atau perusahaan karena dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan. Anggaran dapat digunakan sebagai instrumen akuntabilitas keuangan atas pengelolaan keuangan. Adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan hasil yang hendak dicapai maka akan memudahkan

terciptanya transparansi sehingga pegawai akan dengan mudah untuk mengawasi kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sari (2017) menyatakan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Ntoi (2013) menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. hal ini menunjukkan bahwa apabila anggaran berbasis kinerja meningkat maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila anggaran berbasis kinerja menurun maka akuntabilitas keuangan juga akan menurun.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai suber referensi penelitan selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.

2. Selain menggunakan kuisisioner secara tertulis bisa ditambahkan dengan wawancara atau interview. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdul, Halim. 2007. *Teori Belajar Dana Pembelajaran*. Jakarta: Rineka.
- Bahri, S. P. 2012. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah Studi Pada Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Bandung. Universitas Pasundan."
- Choirul, Saleh. 2012. "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 1, E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan."
- Djayasinga, Marselina. 2015. *Membedah APBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, and Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu

Manajemen YKPN.

- Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.
- Sitoyo, Sandu, Ali, and Sodik. 2015. *Dasar Metodologi*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad F. Syawie, David P.E.Saerang, & Winston Pontoh (2016), Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Bitung.
- Ira Halidayati (2014), Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Muhammad Kamil (2017), Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- Espinoza, (2014), Pengaruh Penerapan Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.
- Eki Kusuma Wardhani (2017), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel *Intervining*.
- Made Budi Sastra Wiguna, dkk (2015), Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- Dendy Syaiful Akbar & Ruhayat (2016), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
- Widya Martha (2014), Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
- Elzhara Eki Kusuma Wardhani (2017), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel *Intervening*.
- Wahdatul (2014), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.